

Daftar Isi Klipping Media Massa Tanggal 17 Juli 2020

Sumber Pengambilan Dokumen

A	Kabupaten Bandung	
1	Pekab Anggarkan Rp 139.93 M	<i>Galamedia/Hal. 5</i>
2	Tahun Ini Pekab Perbaiki 2.607 Rutilahu	<i>Galamedia/Hal.5</i>

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA
BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Pemkab Anggarkan Rp 139,93 M

Entitas / Cakupan : Kabupaten Bandung

Sumber / Hal : Galamedia/Hal. 5

Edisi : Jumat, 17 Juli 2022

Pemkab Anggarkan

Rp 139,93 M

Meningkat di Tengah Pandemi

Sekda, "Kami Harap Partisipasi Pemilih

SOREANG, (GM).-
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, menyatakan siap menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 yang rencananya akan diselenggarakan pada 9 Desember mendatang.

Kesiapan ditunjukkan salah satunya dengan penyediaan anggaran yang jumlah totalnya sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar Rp 139,93 miliar.

"Dari total NPHD tersebut, diperuntukkan bagi KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebesar Rp 99,032 miliar, untuk Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) sekitar Rp 28,9 miliar, dan ada tambahan hibah sekitar Rp 12 miliar untuk penyelenggaraan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) bagi aparat keamanan," ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Kab. Bandung, H. Teddy Kusdiana saat mengikuti acara Sawala Politik Pikiran Rakyat Pilkada Jabar 2020 melalui *video conference* di Bale Riung Soreang.

Dalam rilis yang diterima "GM", Kamis (6/7), sekda juga menjelaskan bahwa Pemkab Bandung telah membentuk desk pilkada melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Bandung Nomor 131/ Kep.130-Tapem/2020 tentang Pembentukan Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Ban-

dung Tahun 2020.

Mengutip pernyataan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, sekda menerangkan bahwa pelaksanaan pilkada seolah dipaksakan di tengah situasi wabah covid-19. "Pilkada 2020 berlangsung di tengah kondisi AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru), sehingga diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid-19 di setiap tahapan. Kalau pelaksanaannya terus ditunda, wabah juga belum tentu akan selesai sehingga tidak efisien dari segi

waktu," papar sekda.

Momen penting

Selain itu, tambah sekda, banyaknya kepala daerah yang habis masa jabatannya membuat pengambilan keputusan atau kebijakan suatu daerah tidak akan maksimal bila terlalu lama dipegang oleh pejabat sementara. "Jadi pelaksanaan pilkada ini, sangat penting dilakukan," tutur Teddy Kusdiana.

Sementara terkait pembengkakan biaya untuk penerapan protokol kesehatan, urainya, pemerintah pusat akan

mengalokasikan anggaran dari sisi pengadaan alat pelindung diri (APD).

"Pemerintah pusat akan mengalokasikan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk pengadaan APD di seluruh TPS (Tempat Pemungutan Suara). Kami berharap, meskipun diselenggarakan dalam masa pandemi, penyelenggaraannya nanti akan lancar dan sukses. Kami juga berharap tingkat partisipasi pemilihan bisa meningkat, dari perkiraan 2,4 juta hak pilih di Kabupaten Bandung," harap Teddy. (B.105)**

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Tahun Ini Pemkab Perbaiki 2.607 Rutilahu
Entitas / Cakupan	: Kabupaten Bandung
Sumber / Hal	: Galamedia/Hal.5
Edisi	: Juamt, 17 Juli 2023

Tahun Ini Pemkab Perbaiki 2.607 Rutilahu

SOREANG, (GM).-

Tahun ini Pemkab Bandung berencana perbaiki 2.607 unit rumah tidak layak huni (rutilahu). Anggaran renovasi tersebut di antaranya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk 236 unit, APBD Provinsi Jabar sebanyak 620, Dana Alokasi Khusus (DAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebanyak 201 unit, dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebanyak 1.550 unit.

Bupati Bandung Dadang M. Nasir mengungkapkan, bantuan yang

diberikan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengurangi angka kemiskinan. "Alhamdulillah, masyarakat Kab. Bandung mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan provinsi. Program ini nantinya akan berjalan secara berjenjang, bersama pemerintah provinsi dan Raksa Desa yang dimiliki pemerintah daerah," ungkap bupati di acara Penyerahan Buku Tabungan Penerima Bantuan Program Perbaikan Rutilahu di Soreang, Kamis (23/7).

Bupati menyebutkan, sekitar 13.725 unit rutilahu di Kab. Bandung belum tersentuh bantuan. "Pembangunan perumahan bagi masyarakat kurang mampu di Kab.

Bandung terus meningkat setiap tahunnya, dan kini tinggal tersisa 13.725 unit. Kami berharap program ini bisa selesai secepat mungkin, sehingga kesejahteraan masyarakatpun ikut meningkat," kata bupati didampingi Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan dan Pertanahan Kab. Bandung Erwin Rinaldi.

Tingkatkan kuantitas

Sementara Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Jawa II Kementerian PUPR, Kiagus Egie Ismail menuturkan, tahun 2020 Balai Penyediaan Perumahan Jabar mendapatkan alokasi dana sekitar Rp 243 miliar untuk kegiatan peningkatan kualitas sebanyak

13.900 unit rutilahu yang tersebar di wilayah Jawa II.

"Tujuannya mendorong pemerintah daerah, agar dapat meningkatkan kuantitas rumah layak huni di wilayah Jawa II, termasuk di Kab. Bandung," ujarnya.

Kiagus menguraikan, kegiatan serah terima buku tabungan merupakan salah-satu bentuk pertanggungjawaban dalam menjalankan program BSPS. "Setiap penerima bantuan akan diberikan Rp 17,5 juta yang dibagi menjadi dua tahap. Masing-masing Rp 15 juta dalam bentuk bahan bangunan, dan sisanya uang tunai yang diberikan langsung kepada pekerja," ungkapnya. **(B.122)****